

ABSTRAK

PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE AKIBAT ADANYA KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA ARBITER DAN PEMOHON (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024)

Oleh

SALSABILA NAZHWA ANINDYA

Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika ada alasan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, salah satunya adalah adanya tipu muslihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria konflik kepentingan dalam perkara arbitrase dan konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Sumber data penelitian berasal dari studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, jurnal hukum, dan putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami norma hukum yang ada dan penerapannya dalam konteks pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 45055/VII/ARB-BANI/2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria konflik kepentingan dalam arbitrase meliputi hubungan hukum yang ada sebelumnya antara arbiter dengan salah satu pihak, kepentingan pribadi yang memengaruhi objektivitas, serta pelanggaran terhadap kewajiban arbiter untuk tetap independen dan netral. Dalam kasus yang diteliti, Mahkamah Agung menemukan bahwa arbiter telah berperan sebagai kuasa hukum salah satu pihak dalam perkara sebelumnya, sehingga mengakibatkan konflik kepentingan yang termasuk dalam kategori tipu muslihat sesuai dengan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa arbiter wajib menjaga integritas dan objektivitas, sehingga setiap pelanggaran prinsip independensi dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk membatalkan putusan arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Konflik Kepentingan, Pembatalan Putusan Arbitrase.

ABSTRACT

ANNOUNCEMENT OF ARBITRATION AWARDS DUE TO CONFLICT OF INTEREST BETWEEN ARBITRATOR AND APPLICANT (Study of Supreme Court Decision Number 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024)

By

SALSABILA NAZHWA ANINDYA

An arbitration award can be annulled for reasons listed in Article 70 of Law No. 30 of 1999, one of which is fraud. This study aims to analyze the criteria for conflicts of interest in arbitration cases and the conflict of interest as a reason for annulling an arbitration award based on the Supreme Court Decision Number 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024.

This study is normative and descriptive-analytical. The data sources are a literature review of laws, legal journals, and court decisions related to the issue under study. The data were analyzed qualitatively to understand existing legal norms and their application in the context of the annulment of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Decision Number 45055/VII/ARB-BANI/2022.

The results indicate that the criteria for conflicts of interest in arbitration include a pre-existing legal relationship between the arbitrator and one of the parties, personal interests that affect objectivity, and a violation of the arbitrator's obligation to remain independent and neutral. In the case under study, the Supreme Court found that the arbitrator had acted as legal counsel for one of the parties in the previous case, resulting in a conflict of interest that falls under the category of fraud in accordance with Article 70 letter c of Law Number 30 of 1999. The judge's considerations emphasized that the arbitrator is obliged to maintain integrity and objectivity, so that any violation of the principle of independence can be considered a legitimate reason to annul the arbitration award.

Keywords: *Arbitration, Conflict of Interest, Cancellation of Arbitration Award.*